



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN POSO
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAIDUL KETENG
2. Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. NHK : 657091

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.860.000.000

1. Tanah Seluas 354 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 741 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 1969 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 383 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 482 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/63 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1261 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1254 m2/400 m2 di KAB / KOTA POSO, WARISAN Rp. 300.000.000
9. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
10. Tanah Seluas 2580 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 5944 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
12. Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp.



160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

233.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU FEROZA Tahun 1997, WARISAN Rp.

20.000.000

2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

120.000.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

3.500.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

80.658.691

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

2.174.158.691

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.174.158.691

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.